

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia. Penganekaragaman pangan adalah suatu langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bangsa yang sejahtera, apabila kebutuhan pangan tercukupi bagi warganya. Ketersediaan pangan dalam jumlah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kehidupan sehari-harinya Nurwati et al., (2016)

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* nomor dua adalah untuk mengakhiri kelaparan, yang mencakup fokus pada ketahanan pangan, pengembangan lebih lanjut rezeki, dan memajukan agribisnis ekonomi. Prioritas pembangunan ketahanan pangan pemerintah Indonesia pada tahun 2018 sejalan dengan tujuan ini. Peraturan Nomor 18 Tahun 2012 memahami hal tersebut “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Ketahanan pangan rumah tangga (keluarga) dapat diartikan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan untuk mencukupi kehidupan anggota keluarganya. Pendapatan keluarga yang maksimal belum bisa menjadi jaminan ketahanan pangan keluarga terpenuhi. Terpenuhi pangan nasional, belum tentu ketahanan pangan rumah tangga (keluarga) tercukupi. Distribusi pangan yang tidak merata menjadi faktor tidak

terpenuhinya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Urgensi ketahanan pangan berkaitan dengan isu kesejahteraan karena pangan menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan.

Provinsi Jambi menjadi wilayah yang memiliki isu kemiskinan. Data menunjukkan Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 5,13 persen, namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi minus 0,27 persen sehingga berdampak terhadap kemiskinan (BPS, 2023). Distribusi penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dilihat di Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2020–2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (%)		
	2020	2021	2022
Kerinci	7,30	7,71	7,57
Merangin	8,63	9,11	8,70
Sarolangun	8,42	8,87	8,48
Batanghari	9,65	10,05	9,63
Muaro Jambi	3,83	4,53	4,47
Tanjung Jabung Timur	10,95	11,39	10,91
Tanjung Jabung Barat	10,29	10,75	10,00
Tebo	6,26	6,68	6,34
Bungo	5,80	6,23	5,38
Kota Jambi	8,27	9,02	8,33
Kota Sungai Penuh	3,03	3,41	2,97
Provinsi Jambi	7,58	8,09	7,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1 Dalam kurun waktu tiga tahun jumlah penduduk miskin di Jambi berfluktuatif dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 yaitu mencapai 7,58 persen (277.800 jiwa), selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,09 persen (293.860 jiwa) dan pada tahun 2022 terjadi penurunan yaitu sebesar 7,62 persen (279,370 jiwa) (BPS, 2022). Persentase terbesar penduduk miskin di Provinsi Jambi berdasarkan Kabupaten/Kota, terdapat di tiga Kabupaten yaitu Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Batanghari, sedangkan persentase terkecil terdapat di Kota Sungai Penuh.

Salah satu kabupaten yang memiliki isu kesejahteraan dan ketahanan pangan di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Batanghari dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ketiga (Tabel 1). Penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 10,05 persen, kemudian terjadi penurunan persentase kemiskinan. Potret kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan dan tingkat ketahanan pangan.

Tingkat kesejahteraan dapat diukur dari besarnya konsumsi untuk pengeluaran rumah tangga. Besarnya pengeluaran perkapita perbulan masyarakat Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan Kabupaten Batanghari pada tahun 2020 sebesar Rp9,825.000,00- selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi Rp10,032.000,00- dan Rp10,173.000,00- Tabel. 2 menunjukkan persentase rata-rata pengeluaran perkapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kabupaten Batanghari selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Batanghari, 2018-2022

Tahun	Makanan (%)	Non Makanan (%)
2018	55,83	44,17
2019	54,56	45,44
2020	55,33	44,67
2021	52,29	47,71
2022	56,45	43,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, (2018-2022)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 dalam kurun waktu lima tahun persentase pengeluaran konsumsi makanan per kapita sebulan di Kabupaten Batanghari meningkat signifikan puncaknya pada tahun 2022 mencapai 56,45 persen (Rp597.598,00-). Sedangkan untuk konsumsi non makanan terus mengalami penurunan yaitu sebesar 43,55 persen (Rp460.975,00). Jika dilihat untuk pengeluaran makanan di Kabupaten Batanghari selama 5 tahun terakhir lebih besar dari 50 persen, dimana nilai ini lebih tinggi dari konsumsi non makanan sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Batanghari masih cukup rendah, karena pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dari 50 persen dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga.

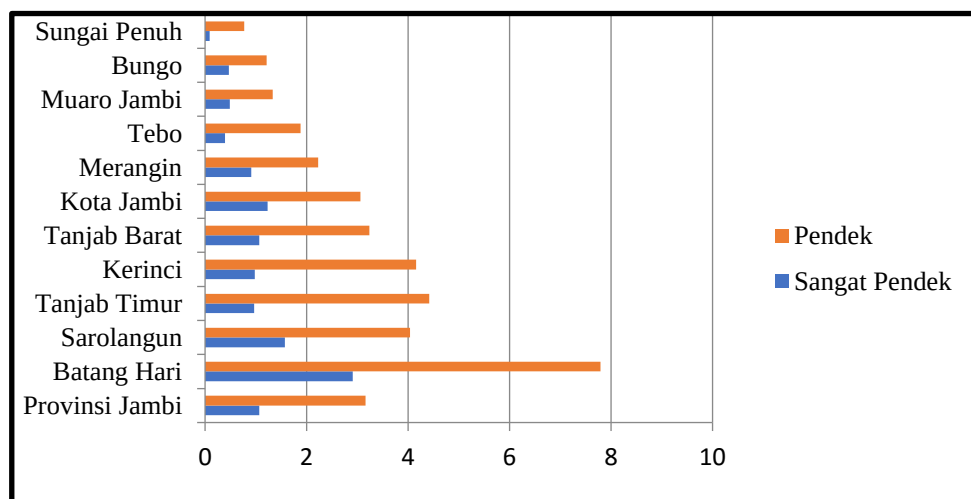
Kondisi tersebut juga dapat menggambarkan tingkat pendapatan petani yang cukup rendah, dimana ketika pengeluaran konsumsi makanan kurang 50 persen maka tingkat pendapatan akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi tingkat pengeluaran untuk kebutuhan makanan seseorang, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan Jannah et al., (2021)

Ketahanan pangan dicirikan oleh ketersediaan pangan yang cukup dan merata di seluruh wilayah serta adanya kemampuan setiap rumah tangga untuk mengonsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batanghari Tahun 2022 mengenai kondisi ketersediaan bahan pangan pokok dan bahan pangan lainnya menunjukkan diantaranya dua belas komoditas pangan terdapat dua komoditi yang belum memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yakni beras dan daging ayam (lampiran 1).

Keterwakilan beras sebagai komoditas pangan utama menunjukkan ketersediaan beras belum mampu memenuhi kebutuhan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022 produksi beras setara dengan 12.917,02 ton beras, atau menurun sebesar 336,11 ton beras dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2021. Pada lampiran 2 dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi hanya ada tiga kabupaten/kota yang dinyatakan sentra produksi padi terbesar yakni Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Tanjung Jabung Timur dengan total produksi secara berurutan 87517.43 ton, 35880.87 ton, dan 24562.32 ton.

Strategi yang dapat dilakukan dalam gagasan ketahanan pangan adalah dengan memperluas ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Gagasan mengenai ketahanan pangan, dilihat dari sisi penciptaan dan penyediaan pangan. Sekalipun suatu daerah mempunyai makanan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang dibutuhkan, hal ini tidak berarti bahwa setiap anggota rumah tangga tidak akan kelaparan atau kekurangan gizi. Masalah gizi merupakan gangguan pada sejumlah aspek kesejahteraan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak tercukupinya zat gizi dari makanan Amalia et al., (2021). Salah satu masalah gizi buruk adalah KEP (Kurang Energi Protein) akibat konsumsi makanan yang tidak

cukup mengandung energi dan protein serta gangguan kesehatan. Masalah gizi kurang yang ada saat ini antara lain disebabkan oleh tidak cukupnya ketersediaan pangan dan zat-zat gizi tertentu tetapi juga dipengaruhi oleh kemiskinan, sanitasi lingkungan yang kurang baik, dan ketidaktahuan tentang gizi. Berdasarkan data prevalensi balita *stunting* yang dikumpulkan oleh WHO, pada tahun 2020 sebanyak 22% atau sekitar 149,2 juta balita di dunia mengalami kejadian *stunting* (World Health Organization, 2021). Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2023, angka *stunting* di Indonesia sebesar 21,6%. Pada tahun yang sama angka *stunting* di Provinsi Jambi sebesar 18% (BKKBN, 2023). Berikut data balita *stunting* di Provinsi Jambi berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:



Gambar 1. Persentase Sangat Pendek dan Pendek (*Stunting*) Pada Balita 0-59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jambi, 2022

Pada gambar 1, untuk usia balita sebesar 1,07% balita sangat pendek dan sebesar 3,16% balita pendek. Kabupaten dengan persentase tertinggi sangat pendek dan pendek (*Stunting*) pada balita adalah Batanghari (sangat pendek sebesar 2,91% dan pendek sebesar 7,79%), sedangkan kabupaten/kota dengan persentase terendah

adalah Kota Sungai Penuh (sangat pendek sebesar 0,09% dan pendek sebesar 0,77%).

Pada tahun 2022 prevalensi stunting Kabupaten Batanghari mencapai angka sebesar 26.3% dan mengalami penurunan angka bayi stunting menjadi 10.01% di tahun 2023, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI). Sementara itu salah satu Kecamatan di Kabupaten Batanghari yang memiliki balita *stunting* yaitu Kecamatan Pelayung sebesar 8,61% (Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, 2023), anak balita yang mengalami kondisi *stunting* per Januari 2023 yaitu sebanyak 83 anak. *Stunting* masih menjadi permasalahan yang serius dan harus segera ditanggulangi agar angka *stunting* bisa mengalami penurunan dan sesuai dengan anjuran WHO (<20%).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara berkembang dapat dilihat dari aspek kemampuan sektor pertanian menyediakan keragaman menu makanan yang nantinya sangat mempengaruhi pola konsumsi dan gizi masyarakat. Sektor pertanian merupakan faktor yang sangat strategis, salah satu basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi Indonesia Isbah et al., (2016)

Sektor pertanian di Kabupaten Batanghari memberikan kontribusi 43,33% dari sektor pertanian terhadap perekonomiannya. Sektor pertanian terbesar berupa tanaman perkebunan seperti kelapa sawit yang pada tahun 2022 memiliki luas lahan sebesar 173.608 ha dengan produksi sebesar 512.901 ton (BPS Kabupaten

Batang Hari, 2022). Berikut luas areal, produksi, produktivitas dan jumlah petani di Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022.

Tabel 3. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Jumlah Petani (KK)
2018	52.351	140.905	2,69	24.365
2019	53.094	141.965	2,67	24.564
2020	53.152	140.905	2,65	24.365
2021	110.655	277.262	2,50	46.312
2022	173.608	512.901	2.95	46.318

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2022

Tabel 3. menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Perkembangan luas lahan di Kabupaten Batanghari tidak lepas dari perkembangan luas lahan kelapa sawit di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Pelayung termasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Batanghari yang memiliki produksi dan produktivitas kelapa sawit yang cukup rendah. Hanya sebesar 10.000 hektar lahan pertanian di Kecamatan Pelayung digunakan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit.

Kecamatan Pelayung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari dimana masyarakatnya bekerja di sektor perkebunan, dengan jumlah petani sebanyak 4.071 KK (lampiran 3). Bagi daerah pedesaan memilih usahatani di sektor perkebunan menjadi salah satu cara untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Besarnya produksi kelapa sawit tentu akan memengaruhi harga kelapa sawit, dimana nantinya harga kelapa sawit dapat berdampak pada pola konsumsi

rumah tangga petani. Turunnya harga kelapa sawit berbanding lurus dengan penurunan tingkat konsumsi masyarakat akan suatu barang.

Menurut data Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Pelayung terdiri dari 18 Desa 1 Kelurahan yang diantaranya memiliki perkebunan kelapa sawit. Berikut luas lahan, produksi, produktivitas dan jumlah petani kelapa sawit berdasarkan desa di Kecamatan Pelayung dapat dilihat pada lampiran 4.

Selain berkebun kelapa sawit masyarakat Kecamatan Pelayung memiliki sumber pendapatan lain seperti pegawai negeri sipil (PNS), wiraswasta, dan pekerjaan lain. Tetapi peneliti hanya meneliti berdasarkan pendapatan bersumber dari usahatani kelapa sawit. Usahatani kelapa sawit yang terdapat di Kecamatan Pelayung merupakan milik sendiri/pribadi (Sumber: Kepala BP3K Kecamatan Pelayung, 2023).

Tanaman kelapa sawit ini menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan sebagian penduduk. Tanaman kelapa sawit sangat diminati masyarakat Kecamatan Pelayung dengan alasan tingkat pendapatan yang lebih baik dibandingkan usahatani lainnya. Hal ini terbukti secara empiris dengan adanya penanaman kelapa sawit di lahan pekarangan para petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Firman et al., (2018) rata-rata pendapatan petani sawit pertahun adalah Rp56,569.905,29. Berdasarkan pendapatan setara beras/kg/kapita/tahun rata-rata termasuk ke dalam masyarakat cukup sejahtera.

Dipilihnya lokasi penelitian ini, berdasarkan kondisi daerah yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani, khususnya sebagai petani kelapa sawit apakah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya. Selain itu, pendidikan ibu rumah

tangga di Kecamatan Pemayung yang relatif rendah yaitu sebanyak 15,33 persen (laki-laki 11,08 persen) penduduk berjenis kelamin perempuan berumur 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batanghari, 2022) hal ini berdampak pada rendahnya pengetahuan gizi dan pola konsumsi pangan sehari-hari dalam rumah tangga.

Semakin beragam konsumsi pangan, maka kualitas pangan yang dikonsumsi semakin baik Vidyarini & Ayunin, (2022) oleh karena itu, diversifikasi pangan tidak hanya sebatas pada diversifikasi konsumsi pokok saja, tetapi juga makanan pendamping agar memperoleh gizi yang berimbang. Oleh karena itu, segi kuantitas dan kualitas pangan rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi gizi rumah tangga dan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola konsumsi pangan rumah tangga petani kelapa sawit, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga serta hubungan antara tingkat kesejahteraan dan pola konsumsi pangan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang ada dengan judul **“Pola Konsumsi Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari”**.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Batanghari memiliki persentase tertinggi sangat pendek dan pendek (*Stunting*) pada balita. Sementara itu salah satu Kecamatan di Kabupaten Batanghari yang memiliki balita *stunting* yaitu, Kecamatan Pemayung. Balita yang mengalami kondisi *stunting* per Januari 2023 yaitu sebanyak 83 anak. *Stunting*

masih menjadi permasalahan yang serius dan harus segera ditanggulangi agar angka *stunting* bisa mengalami penurunan dan sesuai dengan anjuran WHO.

Pemahaman masyarakat khususnya ibu tentang faktor risiko pada penyebab balita *stunting* pada saat kehamilan dan kelahiran belum sepenuhnya diketahui, salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman ibu adalah pengetahuan ibu sendiri dalam pemenuhan nutrisi yang baik selama kehamilan. Pengetahuan ibu yang rendah dapat menyebabkan anak/balita mengalami gizi buruk, karena ibu akan kekurangan wawasan mengenai bahan makanan yang mengandung gizi tinggi sehingga akan mengakibatkan tidak beragamnya makanan yang diberikan kepada anak atau balita.

Besarnya produksi kelapa sawit tentunya dapat berdampak pada tingkat pendapatan petani kelapa sawit. Selain itu, pendapatan petani kelapa sawit yang tidak menentu juga berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga petani. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Persentase pengeluaran konsumsi makanan perkapita sebulan di Kabupaten Batanghari meningkat signifikan puncaknya pada tahun 2022 mencapai 56,45 persen dan untuk konsumsi bukan makanan terus mengalami penurunan yaitu sebesar 43,55 persen. Selama 5 tahun terakhir Kabupaten Batanghari memiliki pengeluaran pangan lebih besar dari 50 persen, dimana nilai ini lebih tinggi dari konsumsi non makanan sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batanghari masih cukup rendah. Kondisi tersebut juga dapat menggambarkan tingkat pendapatan petani yang cukup rendah,

karena semakin tinggi tingkat pengeluaran untuk kebutuhan makanan seseorang, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan potensi sektor pertanian, komoditas utama di Kecamatan Pemayung adalah kelapa sawit. Selain kelapa sawit sebagai komoditas utama hasil pertanian yang dihasilkan adalah padi dan kacang tanah. Di tahun 2018 Kecamatan Pemayung memanen padi mencapai 3-4 ton per hektar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil padi di lahan persawahan yang ada di Kecamatan Pemayung belum bisa dikatakan mampu mendukung program pemerintah untuk surplus pangan di tahun berikutnya. Selain itu, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terutama ibu rumah tangga yang relatif rendah, menyebabkan pola konsumsi pangan di daerah tersebut relatif rendah. Sehingga hal tersebut dapat berdampak pada tingkat ketahanan dan kesejahteraan pangan rumah tangga petani kelapa sawit yang ada Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.

Potensi yang dimiliki tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bagi petani kelapa sawit, yang dapat tercermin dari konsumsi pangan dengan tujuan meningkatnya mutu gizi di tingkat rumah tangga (keluarga). Sehingga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi pangan yang merupakan cerminan dari kesejahteraan rumah tangga juga penting untuk dianalisis. Melalui uraian singkat tentang potensi Kecamatan Pemayung dan permasalahan yang ditemui, dalam penelitian ini dapat ditarik suatu rumasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola konsumsi pangan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung?

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung?
4. Apakah ada hubungan tingkat kesejahteraan terhadap pola konsumsi rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pola konsumsi pangan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung.
3. Menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung.
4. Menganalisis hubungan tingkat kesejahteraan terhadap pola konsumsi rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Pemayung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tentang “Pola Konsumsi Pangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari” diharapkan dapat digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, khususnya terkait pola konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga petani dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi.

2. Bagi masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran tentang upaya peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat khususnya pada rumah tangga petani.
3. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan informasi serta bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.